

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelayanan publik merupakan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat umum yang menjadi warga negara atau secara sah sudah menjadi penduduk negara Indonesia, pelayanan publik disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik dimana yang berhak menjadi penerima pelayanan publik adalah perseorangan atau kelompok. Masyarakat merupakan pelanggan atau penerima pelayanan publik dari penyelenggara pelayanan publik itu sendiri, kualitas pelayanan publik dapat memberikan kepuasan terhadap masyarakat dan juga bisa menjalin ikatan antara masyarakat dan pemerintah.

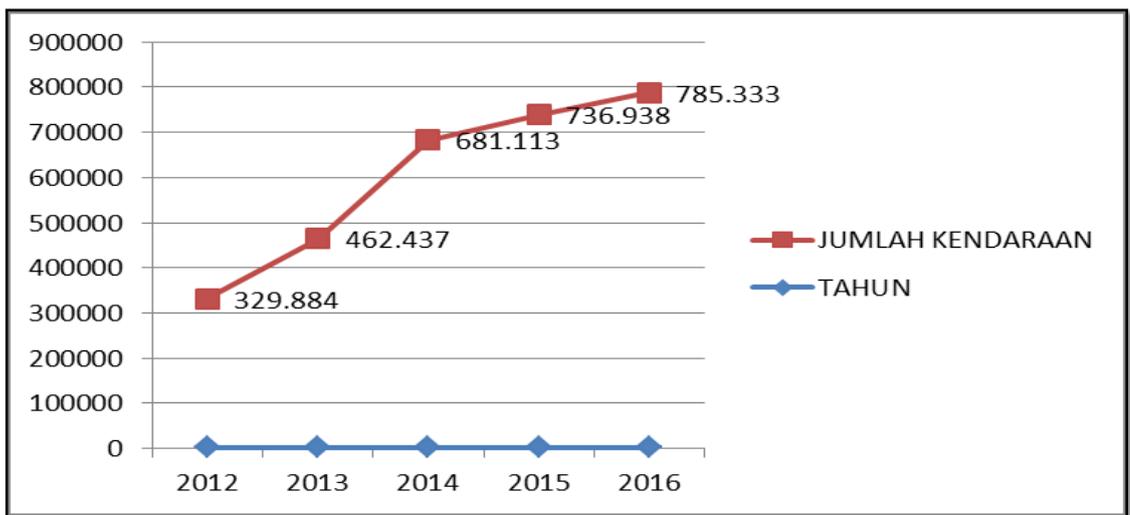
Berdasarkan PP No 38 Tahun 2017 Bab 2 Pasal 4b dan Pasal 5b tentang Inovasi Daerah bahwa inovasi pelayanan publik merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.

Dalam memberikan kualitas pelayanan yang baik dari aparat pemerintah, menurut Permenpan No 17 Tahun 2017 tentang pedoman nilai kinerja unit penyelenggara pelayanan publik dengan partisipasi masyarakat namun kebijakan ini tidak akan bisa berjalan dengan baik apabila pegawai atau aparat pemerintah tidak melakukannya secara konsisten dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat.

Semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk di suatu kota maka akan terjadi peningkatan pula pada jumlah transportasi di kota tersebut, yang berdampak pada peningkatan kebutuhan akan sarana dan prasarana transportasi sebagai penunjang untuk melakukan perjalanan. Keselamatan merupakan salah satu dari prinsip dasar penyelenggaraan transportasi. Pemerintah wajib menyediakan dan memberikan pelayanan transportasi yang aman, selamat, tertib, dan lancar agar masyarakat merasa selamat dan nyaman disaat melakukan kegiatan transportasi

khususnya aktivitas rekreasi dan belanja pada kawasan Kabupaten Jember ini yang terus mengalami peningkatan pembangunan.

1



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, 2017.

Kepadatan lalu lintas di jalan raya tentu saja memerlukan pengaturan yang tepat sehingga bermanfaat bagi keselamatan dan kenyamanan masyarakat dalam berlalu lintas. Hal ini terbukti dengan data bahwa pada tahun 2012 sampai 2016 trend data pertumbuhan kendaraan di Kabupaten Jember terus mengalami peningkatan.

Menurut Peraturan Bupati Kabupaten Jember Nomer 39 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Jember bab 2 ayat 3 dan 4 Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Perhubungan. Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menyelenggarakan fungsi:

- penyiapan perumusan kebijakan di bidang perhubungan;
- pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perhubungan;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang perhubungan;

- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang perhubungan.
- e. pelaksanaan pembinaan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengendalian dan operasional, bimbingan keselamatan;
- f. pelaksanaan pembinaan angkutan dan pembangunan sarana dan prasarana bidang perhubungan;
- g. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengujian kendaraan bermotor, bandara, terminal tipe C;
- h. pemberian surat izin rekomendasi penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;
- i. pelaksanaan pengawasan operasional angkutan perkeretaapian; dan
- j. pelaksanaan persetujuan hasil analisa dampak lalu lintas untuk jalan Kabupaten.

Dinas Perhubungan Kabupaten Jember mempunyai peranan penting dalam memberikan layanan kawasan tertib lalu lintas sebagai dinas yang menangani bidang transportasi dan perhubungan. Dengan upaya-upaya dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dinas perhubungan kabupaten jember meningkatkan penjagaan pos-pos pantau untuk kawasan tertib lalu lintas yaitu ada 18 pos pantau untuk pengawasan ada 4 pos pantau terpadu. Seperti yang di jelaskan di atas bahwa Dinas Perhubungan memiliki peran penting dalam memberikan layanan kawasan tertib lalu lintas akan tetapi apakah sudah sesuai harapan masyarakat pelayanan yang di berikan oleh Dinas Perhubungan kabupaten jember.

Dalam Undang-undang Nomer 22 Tahun 2009, tentang lalu lintas dan angkutan jalan di jelaskan bahwa untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalulintas serta memudahkan bagi pemakai jalan. Maka jalan wajib dilengkapi rambu-rambu lalu lintas dalam tata laksana lalu lintas upaya-upaya untuk menuntun, mengarahkan, melarang dan sebagainya agar pergerakan lalu lintas aman, lancar dan nyaman.

Dalam memberikan layanan kawasan tertib lalu lintas Dinas Perhubungan kabupaten jember juga berkoordinasi dengan Satlantas demi mewujudkan pelayanan transportasi yang lebih baik untuk jember, termasuk menciptakan

kondisi lalu lintas dan keamanan warga. Kawasan tertib lalu lintas merupakan kawasan yang dibangun, dibina dan dibentuk serta diawasi untuk menjadi suatu kawasan yang mencerminkan dan mengimplementasikan bagaimana lalu lintas yang baik dan benar.

Dalam koordinasi pasti akan ada kendala atau perbedaan orientasi perbedaan formulitas struktur dari perbedaan tersebut akan mempengaruhi koordinasi antara Dinas Perhubungan dan Satlantas.

Melihat kondisi seperti hal yang dijelaskan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana koordinasi Antara Dinas Perhubungan dengan Satlantas dalam memberikan layanan kawasan tertib lalu lintas yang telah di paparkan diatas. Berdasarkan penjelasan diatas peneliti tertarik untuk mengangkat judul skripsi mengenai "Koordinasi Antara Dinas Perhubungan Dengan Satlantas Dalam Memberikan Layanan Kawasan Tertib Lalu Lintas Kota Jember"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang timbul adalah Bagaimana koordinasi antara Dinas Perhubungan dengan Satlantas dalam memberikan layanan kawasan tertib lalu lintas kota Jember?

1.3 Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan koordinasi antara Dinas perhubungan dengan Satlantas dalam memberikan layanan kawasan tertib lalu lintas Kota Jember. Sedangkan secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan koordinasi.

- a. Mendeskripsikan koordinasi antara Dinas Perhubungan dengan Satlantas dalam memberikan layanan kawasan tertib lalu Lintas kota Jember.
- b. Mendeskripsikan factor-faktor penghambat dan pendukung koordinasi antara Dinas Perhubungan dengan Satlantas dalam memberikan layanan kawasan tertib lalu lintas Kota Jember.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Praktis

Secara umum, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan umpan balik kepada pemerintah kabupaten Jember, khususnya Dinas Perhubungan Kabupaten Jember dan Satlantas Jember mengenai koordinasi antara Dinas Perhubungan Dengan Satlantas dalam memberikan layanan kawasan tertib lalu lintas Kota Jember. Secara rinci, umpan balik koordinasi dalam memberikan layanan kawasan tertib lalu lintas

- a. Hasil analisis koordinasi antara Dinas Perhubungan dengan Satlantas dalam memberikan layanan kawasan tertib lalu lintas.
- b. Saran penyempurnaan kegiatan dan program kawasan tertib lalu lintas yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan Satlantas
- c. Saran kebijakan penyempurnaan tentang kawasan tertib lalu lintas

1.4.2. Manfaat Teoritis

Dari segi teoritis, hasil penelitian ini bermanfaat untuk memberikan kontribusi literasi Ilmu Pemerintahan dalam pengkoordinasian antar instansi khususnya dalam koordinasi kawasan tertib lalu lintas dan factor-faktor penghambat dalam koordinasi antar instansi.

1.4.3. Manfaat Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peneliti di bidang penelitian. Di bawah bimbingan dosen, peneliti mendapatkan pengalaman berharga yang tidak terlupakan mengenai tata cara atau metode penulisan karya ilmiah serta mempertahankan dihadapan dewan penguji.